

# IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA BERBASIS GENDER

Nur Danisa Rahmadani (192020100048)

Nama Dosen Pembimbing

Isna Fitria Agustina

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023



# Latar Belakang

- Pembangunan Desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan.
- Kesetaraan gender telah menjadi isu kebijakan universal, dan telah menjadi gerakan dihampir setiap sudut dunia. Dengan kesetaraan gender berarti tidak terdapat pembakuan kedudukan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi serta kekerasan terhadap perempuan ataupun laki-laki [4]. Gender bukanlah perbedaan jenis kelamin melainkan perbedaan fungsi dan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat sekitar terhadap perempuan dan laki-laki yang melahirkan pembagian peran dan fungsi sosial yang berbeda.
- Kesetaraan gender berkaitan dengan aspek kesejahteraan. Sebagaimana yang tertuang di dalam target dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).



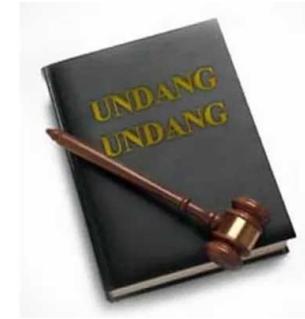
# Latar Belakang

- Pembangunan nasional dapat memenuhi kebutuhan semua orang Indonesia. Setelah lebih dari dua puluh tahun sejak Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, diharapkan program PUG telah berkembang di setiap tahap pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. PUG adalah metode yang digunakan negara kita untuk mengatasi berbagai kompleksitas masalah kesenjangan gender yang ada. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah diminta untuk memasukkan gender ke dalam semua dimensi pembangunan.



# LATAR BELAKANG

Proses penelitian dilakukan di Desa Candiwates Kabupaten Pasuruan dengan perolehan data jumlah penduduk pada tahun 2022 dengan jumlah Wanita 2.666 orang dari total penduduk 5.831. Dengan persentase 80% usia produktif dan 20% usia lanjut serta balita atau belum cukup umur, dalam implementasi kesetaraan gender jumlah perempuan produktif yang ada pada perekonomian desa dapat dibantu tanpa harus mengandalkan pekerjaan dari laki-laki saja. Maka dari itu dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengetahui pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan oleh semua gender baik dilakukan perempuan maupun laki-laki untuk mengoptimalkan kinerja dari gender masing-masing.



Selain teori Pembangunan Desa, penelitian ini juga menggunakan konsep Kesetaraan Gender yang berdasarkan teori Edward Wilson dari Harvard University (Sasongko, 2009:16-21) membagi perjuangan perempuan secara sosiologis.



# PENELITIAN TERDAHULU

Erna Ermawati Chotim berjudul “Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap UKM *Cirebon Home Made*)”. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menilai tingkat pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan 3 indikator penting yaitu: partisipasi dalam Pendidikan di tingkat dasar, menengah dantinggi, pekerjaan dan keputusan politik, memanfaatkan sumber data sekunder dan berharga. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pendekatan deskriptif, dengan narasumber pemilik *Cirebon Home Made*

Yang kedua penelitian dari Suriani Nur berjudul “Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup”. Dalam penelitian ini membahas tentang kemampuan perempuan dalam menata sumber daya alam dan lingkungan hidup, namun kurangnya kepercayaan diri membuat para perempuan jarang ikut adil dalam semua kegiatan pembangunan di Indonesia dan termasuk lingkungan hidup. Karena strategi pengaruh utama perempuan penting diposisikan di tempat utama dalam setiap strategi pembangunan

# PENELITIAN TERDAHULU

Yang ketiga penelitian dari Elsa Purwaningsih dengan judul “ Prespektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prespektif kesetaraan gender terhadap kemajuan pembangunan daerah di Kecamatan Tomori Kabupaten Lawu Timur melalui organisasi PKK. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menghasilkan data ber bentuk deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian yg di lakukan pemerintah telah mencangkan strategi pembangunan kesetaraan gender melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi di Kecamatan Tomori

Dan yang terakhir Mulia Munaafaturisa dengan judul “Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Simpan Pinjam Bagi Perempuan di Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam kegiatan yang ada di simpan pinjam bagi perempuan di Desa mereng, mengetahui kebutuhan praktis danstrategi perempuan yang telah dipenuhi oleh program simpan pinjam bagi perempuan, serta untuk mengetahui tingkat keberdayaan perempuan yang mengikuti program simpan pinjam bagi perempuan. Dengan kesimpulan bahwasannya perempuan telah berpartisipasi dalam kegiatan Program Simpan Pinjam namun belum memiliki kontrol dalam program tersebut.

# TABEL 1.1 JUMLAH PENDUDUK

Jenis Kelamin	Tahun	Jumlah Penduduk
Perempuan	2023	2.535
Laki laki	2023	2.678
<b>Total</b>		<b>5.213</b>

# TABEL 1.2 ANGGARAN DESA

## TAHUN 2022-2023

Bidang Pembangunan	Anggaran	
	2022	2023
<b>Honor Guru TPQ dan MADIN</b>	25.000.000	32.000.000
<b>Honor Kader Kesehatan dan Stunting</b>	26.500.000	19.125.000
<b>PMT Posyandu dan Stunting</b>	56.710.000	56.710.000
<b>Penyuluhan Kesehatan, Peningkatan Kapasitas Kader dan Rembuk Stunting</b>	24.000.000	22.540.000
<b>Rehab Gedung Ponkesdes</b>	-	73.225.000
<b>Pembangunan TPT dan pavingisasi Dusun Patuk RT 28</b>	-	60.420.000
<b>Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Ledok Tani RT.32</b>	-	19.907.000
<b>Bantuan Benih untuk Petani</b>	15.750.000	18.750.000
<b>Pelatihan membuat kue kering</b>	4.580.000	6.580.000
<b>Pelatihan membuat kue berbahan baku ubi</b>	4.580.000	6.580.000
<b>Total</b>	157.120.000	326.077.000

# Tabel 1.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

## Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan		
	Pendapatan Asli Desa (PAD)	20.400.000	20.400.000
	Pendapatan Transfer	1.753.598.000	1.755.832.881
	Dana Desa (DD)	918.912.000	918.912.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	116.944.000	116.944.000
	Alokasi Dana Desa (ADD)	334.696.000	334.696.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten	308.046.320	308.046.032
	Bantuan Kuangan Propinsi	75.000.000	75.000.000
	Bunga Bank		2.234.561
	Total Pendapatan	1.773.998.320	1.776.232.881
2	Belanja		
	Bidang Pembangunan	340.045.500	340.045.000
	Sub Bidang Pendidikan	24.500.000	24.500.000
	Sub Bidang Kesehatan	136.170.000	136.170.000
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151.020.500	151.020.500
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	28.355.000	28.355.000

# Tabel 1.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	144.866.500	144.866.500
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	134.991.500	134.991.500
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	9.875.000	9.875.000
	Pembiayaan	74.000.000	74.000.000
	Modal untuk BUMDESMA	2.000.000	2.000.000
	Bantuan Modal dari Propinsi	72.000.000	72.000.000
	Surplus / Defisit		
	Silpa Tahun Berjalan	24.948.458	

# Tabel 1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan Transfer	1.834.926.320
	Alokasi Dana Desa (ADD)	344.659.000
	Dana Desa (DD)	1.060.372.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	131.812.000
	PBK	298.083.320
	SILPA T.A 2022	24.948.458
	Total Pendapatan	1.859.874.778
2	Bidang Pembangunan	638.286.500
	Honor Guru TPQ dan Madin	
	Honor Kader Kesehatan dan Stunting	19.125.000
	PMT Posyandu dan Stunting	56.710.000
	Penyuluhan Kesehatan, peningkatan kapasitas kader dan rembuk stunting	22.540.000
	Rehab Gedung Ponkesdes	73.225.000
	Pembangunan TPT dan Pvingisasi Dusun Patuk RT 28	60.420.000
	Pavingisasi Dusun Kalongan RT 26	15.155.000
	Pavingisasi Dusun Payak RT 15	25.920.000

# Tabel 1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran
	Pavingisasi Dusun Kalongan RT 27	11.815.000
	TPT jalan usaha tani Dusun Jawi RW 03	45.525.000
	Pavingisasi jalan usaha tani Dusun Wonosalam	52.470.000
	Pavingisasi jalan usaha tani Dusun Ledok Tani	16.545.000
	TPT dan Pavingisasi jalan usaha tani Dusun Payak RT 13	27.255.000
	TPT jalan usaha tani Dusun Blembem RW 04	43.360.000
	Gorong – Gorong Dusun Wonosalam RT 20	24.660.000
	Pembangunan TPT jalan Dusun Ledok Tani RT 32	21.327.500
	Pipanisasi Dusun Bulakombo	41.844.000
	Pipanisasi Dusun Jawi RW 002	48.390.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	62.057.500
	Pembangunan saluran irigasi Dusun Ledok Tani RT 32	19.907.500
	Bantuan benih untuk petani	18.750.000
	Pelatihan membuat kue kering	6.580.000
	Pelatihan membuat kue berbahan baku ubi	6.580.000

# Permasalahan yang ditemui



Beberapa indikator masalah dari tahun 2022 hingga 2023 saat ini masih belum ada kemajuan dalam target pembangunan kesetaraan gender di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Beberapa permasalahan yaitu pertama kegiatan ibu PKK Sebagian besar kegiatan tersebut belum berjalan dengan lancar, kedua pelatihan dan workshop tentang hak – hak perempuan sebagian kecil belum terlaksana dan ketiga masih belum ada pembentukan Lembaga Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Dari ketiga kegiatan tersebut dan dilihat dari tabel anggaran desa didapatkan di Desa Candiwates sudah ada upaya tentang pemberdayaan dan penguatan perempuan akan tetapi upaya tersebut masih tergolong rendah dibandingkan program pembangunan desa yang lain. Dari beberapa penjabaran tabel, permasalahan sudah cukup jelas terlihat, dan juga kegiatan serta program kedepan sudah dipikirkan. Akan tetapi, masih rendahnya upaya desa dalam melakukan penguatan perempuan untuk dapat terwujudnya pembangunan desa yang berkeadilan gender serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perencanaan pembangunan Desa Candiwates masih belum jelas kapan bisa mewujudkan harapan dan target untuk meningkatkan kesetaraan gender



# METODE



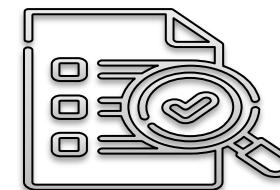
## Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian Penelitian kualitatif



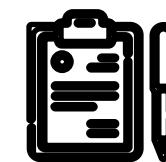
## Lokasi Penelitian

Desa Candiwates Kecamatan Prigen  
Kabupaten Pasuruan



## Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah pembangunan desa yang berkeadilan gender dalam upaya perwujudan kesetaraan gender



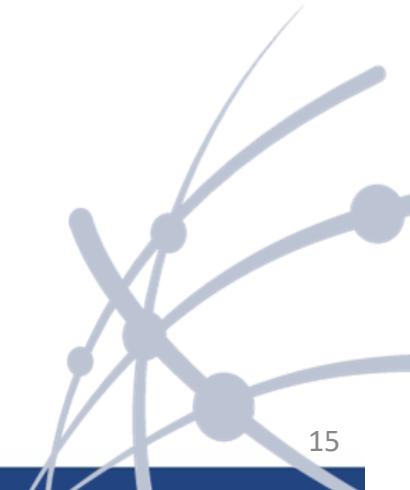
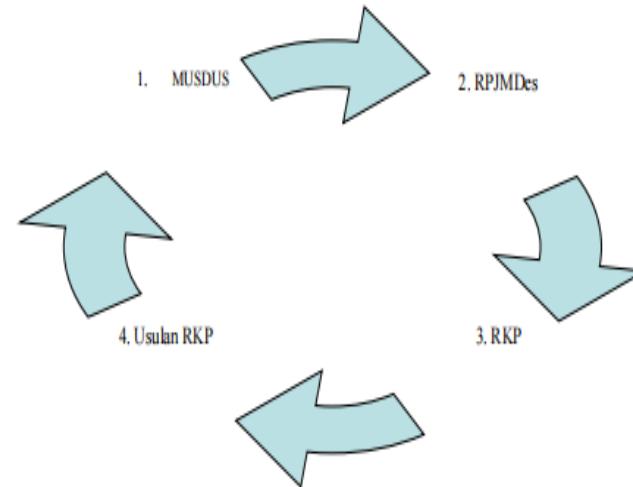
## Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, Observasi, dan  
Dokumentasi



# HASIL DAN PEMBAHASAN

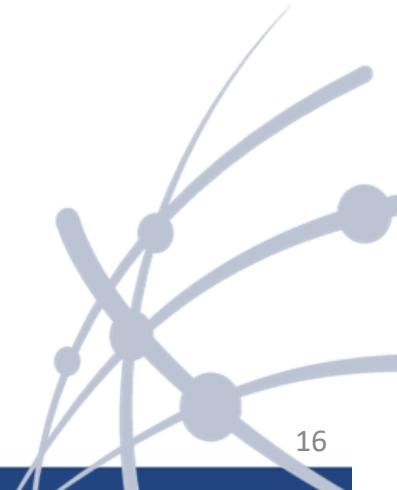
Perencanaan pembangunan Desa yang didasarkan pada hasil pembahasan Desa diatur dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa dapat menjadikan Rencana Pembangunan Desa sebagai acuan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RPJM Desa. Tahap penting pertumbuhan komunitas ini sudah berlangsung. Perkembangan suatu desa dapat diringkas sebagai berikut:



# HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan di sektor publik, sektor pembangunan, dan sektor kemasyarakatan semuanya berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yang pada akhirnya mendukung pembangunan desa. Prosedur dan tahapan yang terlibat dalam pembangunan desa sangat penting untuk kemajuannya. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam rangka mengembangkan kebijakan yang tepat. Penting bagi seluruh masyarakat untuk terlibat. Tingkat RT, RW, dan Musdus menjadi titik tolak proses pembangunan desa yang berbasis musyawarah. Tingkat partisipasi yang dimiliki individu dan kelompok dalam masyarakat. Telah diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan komunal sebagian besar terbatas pada fungsi-fungsi seremonial. Hanya satu sisi cerita yang diceritakan dalam pertemuan RT, RW, dan Musdus karena adanya seksisme dan bentuk diskriminasi lainnya.

Partisipasi perempuan dipandang penting bagi kemajuan suatu komunitas. Alasannya sederhana, perempuan mempunyai kemampuan untuk memimpin dan berpartisipasi pada tingkat yang tinggi. Dalam upaya meningkatkan komunitas mereka, perempuan memainkan peran penting. Namun hal ini sering terabaikan dalam perencanaan, padahal merupakan bagian integral dari proses RT, RW, dan Musdus. Oleh karena itu, perempuan hanya bisa bekerja sebagai pelaksana.



# HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Edward menggambarkan pelaksanaan pembangunan desa berbasis gender melalui empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 1) Komunikasi

Edward III mengidentifikasi tiga aspek kunci komunikasi yang efektif: (1) transmisi, atau metode penyebaran informasi; (2) kejelasan informasi yang disebarluaskan; dan (3) konsistensi dalam menyebarkan informasi. “proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan,” sebagaimana dijelaskan oleh Edward III, merupakan definisi lain dari komunikasi.

Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur dari seberapa baik tujuannya dikomunikasikan. Obrolan dengan Sekretaris Desa, perempuan bernama Bu Lina, membenarkan adanya indikasi komunikasi tersebut. Saat wawancara, saya menanyakan kepada Ibu Lina tentang topik kesetaraan gender dalam Pembangunan Desa, khususnya apakah topik tersebut sangat berpengaruh atau tidak, dan yang lebih umum, dalam sosialisasi seperti apa hal ini dibuktikan. Bu Lina kemudian berkata, “Nah mbak, jadi tanggapan saya mengenai kesetaraan gender atau hal-hal yang berbasis gender dalam urusan pembangunan desa, memang perlu dihubungkan.” Karena ini melibatkan lebih dari sekedar pria dan wanita. Timbangannya harus seimbang. Karena alasan sederhana bahwa paritas penting untuk inklusi. Masyarakat pasti akan berpartisipasi sekarang setelah desa ini terbentuk, kak, haha. Karena saya seorang perempuan sekretaris desa, penting bagi saya bahwa perempuan mempunyai suara dalam perencanaan untuk masyarakat kami. Jika ada bukti, mungkin menjadi tanggung jawab kami sebagai perwakilan pemerintah untuk menyampaikan rinciannya dan mengadakan pertemuan.

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan wawancara yang relevan dengan indikator Komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis Gender, keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa akan tercapai apabila para pengambil keputusan telah mempersiapkan diri dengan baik.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa menurut indikator Komunikasi, Pembangunan Desa Berbasis Gender di Desa Candiwates belum berada pada tingkat implementasi yang optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erna Ermawati Chotim yang bertajuk “Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia.



# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2) Sumber Daya

Setiap kebijakan, menurut Edward III, harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun uang. Dalam skenario ini, kapasitas untuk menggunakan sumber daya, seperti sumber daya manusia dan keuangan, sangat penting bagi efektivitas implementasi kebijakan.

Dari wawancara ini terlihat jelas bahwa meskipun informasi yang disajikan dalam suatu kebijakan sangat jelas dan konsisten, hal ini bukanlah satu-satunya aspek yang mempengaruhi implementasi aktualnya. Jika dibandingkan dengan penelitian serupa, penelitian ini tampaknya cukup cocok. Kajian Suriani Nur bertajuk “Memberdayakan Perempuan untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup” Bahwa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yang mengalami kurangnya rasa aman akibat tidak setaranya akses terhadap sumber daya penelitian. Kajian ini serupa karena keduanya belum memiliki jobdesk yang dapat diterapkan dengan jelas dan saat ini sedang bekerja sama untuk saling membantu. Kebutuhan dan pentingnya sumber daya adalah hal yang paling vital. Dalam konteks ini, “sumber daya” berhubungan dengan hal-hal seperti karyawan yang berkualitas, gedung dan peralatan yang memadai, anggaran yang cukup, dan waktu yang cukup untuk melaksanakan program. Oleh karena itu, faktor penting kedua dalam menegakkan aturan penyebaran data adalah ketersediaan sumber daya yang relevan.

Berdasarkan teori indikator sumber daya Edward, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Candiwates belum mempunyai sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan yang memadai untuk menukseskan Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender saat ini. Pejabat di masyarakat masih berupaya untuk menstandardisasi peran dan tanggung jawab kepolisian. Alokasi dana pemerintah federal oleh Pemerintah Desa Candiwates dilaporkan merupakan praktik standar bagi pemerintah daerah dengan ukuran yang sama.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Di sini disposisi pelaksana merupakan segi tindakan atau reaksi yang dilakukan oleh agen yang melakukan penerapan. Pelaksana kebijakan mungkin gagal memenuhi standar dan mencapai tujuan jika mereka kurang memahami tujuan dan maksud kebijakan. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan para pelaksana dalam memenuhi kriteria dan tujuan kebijakan. Sedangkan Edward mendefinisikan disposisi sebagai “kehendak, keinginan, dan kecenderungan para praktisi kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud”.

Berdasarkan apa yang disampaikan dalam wawancara, jelas bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan di Desa Candiwates harus memiliki semangat dalam bekerja dan berdedikasi untuk memajukan kesetaraan gender melalui inisiatif seperti Pembangunan Desa Berbasis Gender. Oleh karena itu, dari hasil wawancara langsung dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap (Disposisi) pelaksana merupakan segi dari perilaku atau respon yang dilakukan para pelaksana dalam melaksanakan Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender di Desa Candiwates apabila dilihat dari sudut ini. Pemerintah daerah Candiwates lah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan ini. Berbeda dengan penelitian Suriani Nur sebelumnya, “Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan & Peningkatan Partisipasi Pembangunan Lingkungan Hidup,” dimana peran perempuan masih bersifat penakut dan tidak percaya diri dalam berpartisipasi dalam meningkatkan partisipasi pembangunan lingkungan hidup, penelitian ini menemukan bahwa pelaksana mengambil sikap yang lebih agresif. pendirian. Sangat disayangkan bila perempuan tidak bersuara atau mengambil inisiatif, dan malah menaruh kepercayaannya pada laki-laki.

Temuan penelitian ini dapat dibandingkan dengan temuan penelitian lain dan melihat bagaimana temuan tersebut digunakan dalam praktik. Kebijakan ini memperjelas bahwa sikap pelaksana dalam menciptakan program pembangunan desa berbasis gender adalah mendampingi laki-laki dan perempuan secara setara agar mereka dapat tumbuh dan berpartisipasi dalam program tersebut secara bersama-sama.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4) Struktur Birokrasi

Dalam konteks implementasi kebijakan, struktur birokrasi mengacu pada sifat, kebiasaan, dan jaringan yang berulang antara otoritas eksekutif dan sumber daya yang mereka miliki. Efisiensi penerapan kebijakan pemerintah merupakan ukuran efektivitas birokrasi.

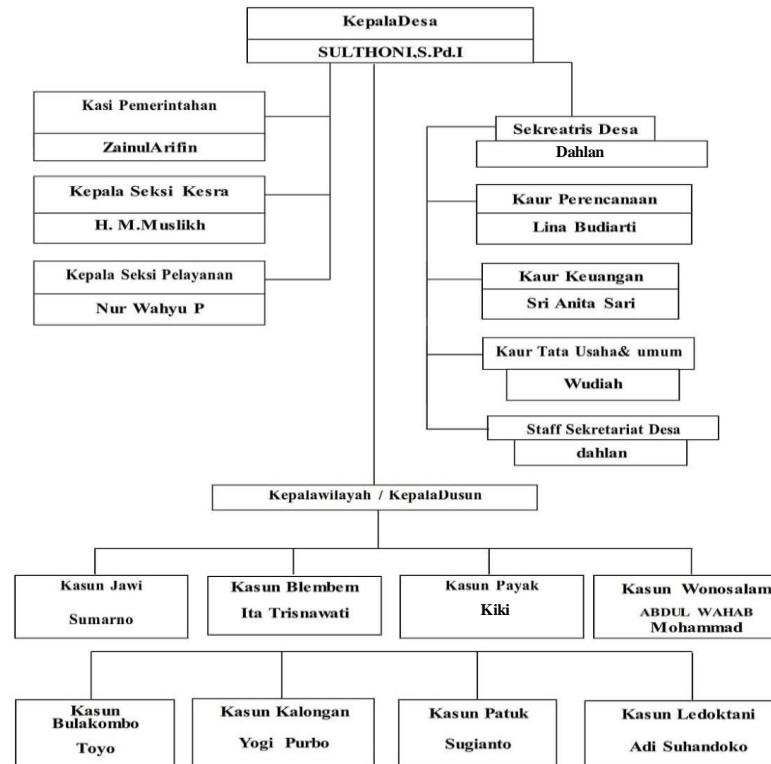
Teori Edward dengan Indikator Struktur Birokrasi menjelaskan bagaimana struktur birokrasi berkontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan keempat. Kesimpulan Struktur birokrasi dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis gender di Desa Candiwates telah menghasilkan pola hubungan yang baik dan selaras dengan meja kerja atau tugas masing-masing perangkat desa.



# HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan Struktur Organisasi terkait, Pemerintah Desa Candiwates Prigen di Kabupaten Pasuruan telah menetapkan kerangka birokrasi pembangunan desa berbasis gender sebagai berikut.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa CANDIWATES



# KESIMPULAN

Secara teori Edward III dapat dipaparkan ada 4 indikator yang terkait dengan Implementasi Pembangunan Desa Berbasis Gender antara lain : yang pertama Komunikasi, Keterkaitan komunikasi pada penelitian ini adalah sosialisasi terkait program atau kegiatan perempuan di Desa Candiwates yang memang perlu dikembangkan lebih pesat lagi. mendukung atau menyusun struktur yang sesuai.

Kedua, selain sumber daya manusia, sumber daya lain seperti sumber daya moneter dan temporal juga sangat penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Jika dibandingkan dengan penelitian serupa, penelitian ini tampaknya cukup cocok. Kajian Suriani Nur bertajuk “Memberdayakan Perempuan untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup” Bawa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yang mengalami kurangnya rasa aman akibat tidak setaranya akses terhadap sumber daya penelitian.

Dispositioni adalah faktor ketiga. Dalam sudut pandang ini, sikap (disposisi) pelaksana merupakan segi perilaku atau tanggapan yang dilakukan oleh para pelaksana dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan Desa Berbasis Gender, yang berupaya memberikan bantuan baik kepada laki-laki maupun perempuan tanpa memihak pada salah satu gender dalam rangka mencapai tujuan. untuk mendorong pembangunan dan partisipasi yang setara.

Terakhir, struktur administrasinya selaras dengan berbagai fungsi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan desa di Candiwates. Indikator Struktur Birokrasi ini sebanding dengan karya yang dilakukan oleh Elsa Purwaningsih yang berjudul “Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”. Jika keduanya sebanding, kerangka kerja yang sesuai dapat dibuat dengan meminta mereka saling mendukung. Inisiatif-inisiatif baru akan diluncurkan di masa depan, berkat studi yang dilakukan di masa lalu. Dengan kerangka administratif yang jelas dan antusiasme yang luas dari pejabat pemerintah.



# REFERENSI

- R. A. Pratama, C. D. Wahyudi, K. K. Adisty, T. Cartika, R. Kamil, and A. Murtado, “PEMBANGUNAN DESA PANGANDARAN ( Hasil Musrenbang Perencanaan Pembangunan Desa Pangandaran ),” pp. 434–443.
- A. Ariadi, “Perencanaan Pembangunan Desa,” *Meraja J.*, vol. 2, no. 2, pp. 135–147, 2019, [Online]. Available: <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45>
- D. I. K. Banyumas, H. Nuraini, J. Administrasi, P. Fakultas, I. Sosial, and P. Unsoed, ““ Kebijakan Pro Gender Dalam Percepatan Pembangunan Desa Yang Berpihak Pada Perempuan,” vol. 6, no. November, 2019.
- W. K. Rahayu, “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah),” *J. Anal. dan Pelayanan Publik*, vol. 2, 2016.
- I. W. Budiarta, “Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan,” *J. Ilm. Ilmu Sos.*, vol. 8, no. 1, pp. 23–33, 2022, doi: 10.23887/jiis.v8i1.40982.
- A. Agung, I. Ngurah, D. Prami, and N. P. Widiastuti, “Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Sektor Ekonomi Kreatif di Desa Paksebali,” vol. 12, no. 1, pp. 140–148, 2023.
- N. Janah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’ān Karya Nasaruddin Umar,” *Sawwa J. Stud. Gend.*, vol. 12, no. 2, p. 167, 2017, doi: 10.21580/sa.v12i2.1707.
- R. Probosiwi, “Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial,” *J. Natapraja*, vol. 3, no. 1, pp. 41–72, 2015.
- N. S. Wisnujati, “Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro,” *J. Ilm. Sosio Agribis*, vol. 20, no. 2, pp. 67–81, 2020, doi: 10.30742/jisa20220201224.



# REFERENSI

- M. Fanzikri, “Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan DanPembangunan Desa Di Aceh,” *Al-Ijtima`i Int. J. Gov. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 1, pp. 81–106, 2019, doi: 10.22373/jai.v5i1.466.
- N. Prasetyawati, “Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia,” *IPTEK J. Proc. Ser.*, vol. 0, no. 5, p. 53, 2018, doi: 10.12962/j23546026.y2018i5.4421.
- M. A. Nova, “Peran perempuan dalam pembangunan Desa (Studi femenisme dangender pada perempuan Desa Blang Krueng Aceh Besar),” *J. Al-Ukhwah*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2022.
- F. Kurnianingsih, M. Mahadiansar, R. A. Putri, and O. R. Azizi, “Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang dalam Masa Pandemi COVID-19,” *J. Ilmu Sos. danHum.*, vol. 11, no. 1, pp. 45–55, 2022, doi: 10.23887/jish.v11i1.37594.
- K. Pemberdayaan, P. Dan, and P. Anak, “RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER,” 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak (Kemen PPPA), *pembangunan manusia berbasis gender 2020*. 2020.
- E. E. Lasut, V. P. K. Lengkong, and I. W. J. Ogi, “Analisis Perbedaan Kinerja...,” *J. EMBA*, vol. 5, no. 2, pp. 2771–2780, 2771.
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif danR&D.,” in *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif danR&D.*, Bandung, 2016.
- Erna Ermawati Chotim, “KESETARAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DIINDONESIA: KEINGINAN DANKENISCAYAAN PENDEKATANPRAGMATIS (STUDI TERHADAP UKM CIREBON HOME MADE)”,
- S. Nur, “PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK KESETARAAN & MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP”.
- T. Kemajuan *et al.*, “SKRIPSI PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER.”

# TERIMA KASIH



